

ABSTRAK

Raden Muhammad Ridwan Fahrudin (2024), *Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan* dengan komisi pembimbing **Husen Alting dan Sultan Alwan.**

Tujuan Penelitian ini yaitu (1) mengetahui efektivitas fungsi Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian non litigasi dalam meningkatkan kemanfaatan kepatuhan kewajiban pemberi kerja pada jaminan sosial Ketenagakerjaan; (2) Untuk mengetahui hambatan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa non litigasi dalam meningkatkan kepatuhan pemberi kerja dalam pendaftaran jaminan sosial Ketenagakerjaan.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian hukum empiris dengan studi lapangan/*field research* dengan menelusuri data primer berupa wawancara dengan narasumber serta responden. Penelitian empiris dilakukan di lokasi Provinsi Maluku Utara, teknik pengambilan sampel dengan cara non probability sampling dengan teknik purposive sampling. Wawancara dilakukan terhadap responden dan narasumber dengan menggunakan alat berupa pedoman wawancara. Analisis data menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Efektivitas Jaksa Pengacara Negara dalam penegakan non litigasi dalam meningkatkan kemanfaatan kepatuhan pada program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan belum berjalan efektif. Hal ini dapat terlihat dari berbagai faktor yang melatarbelakangi seperti faktor hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana prasarana, dan faktor masyarakat. Sedangkan untuk hambatan eksternal dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan berupa masih kurangnya sarana dan prasarana pada Stakeholder terkait, Pemberi kerja secara geografis masih jauh diluar pulau Provinsi Maluku Utara, data Informasi tunggakan dari BPJS Ketenagakerjaan masih belum lengkap dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat khususnya pekerja dan pemberi kerja dalam hal ini perusahaan belum maksimal.

Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Jaminan Sosial

ABSTRACT

Raden Muhammad Ridwan Fahrudin (2024), *The function of the State Attorney in Non Litigation Law Enforcement in the Implementation of the Employment Social Security Program* with the supervisory commission Husen Alting and Sultan Alwan.

The objectives of this study are (1) to determine the effectiveness of the function of the State Attorney in non-litigation law enforcement in increasing the benefits of compliance with employer obligations on Employment social security; (2) To find out the obstacles of the State Attorney in non-litigation law enforcement in increasing employer compliance in Employment social security registration.

This research is empirical research. Empirical legal research with field studies/field research by tracing primary data in the form of interviews with sources and respondents. Empirical research was conducted at the location of North Maluku Province, sampling technique by non probability sampling with purposive sampling technique. Interviews were conducted with respondents and sources using tools in the form of interview guidelines. Data analysis using qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion, the effectiveness of the State Attorney in non-litigation enforcement in increasing the benefits of compliance with the Employment Social Security program has not been effective. This can be seen from various background factors such as legal factors, law enforcement apparatus factors, infrastructure factors, and community factors. As for external obstacles in the implementation of BPJS Ketenagakerjaan in the form of a lack of facilities and infrastructure in related stakeholders, geographically employers are still far outside the island of North Maluku Province, data on arrears information from BPJS Ketenagakerjaan is still incomplete and the lack of socialization to the community, especially workers and employers in this case the company has not been maximized.

Keywords: State Attorney, Social Security